



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan diktum Kesatu dan diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten sebagai unsur pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 - 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah; (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Instansi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.
8. IKU Perangkat Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2023–2026 terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU Perangkat Kabupaten.



- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.
- (4) IKU Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 5

- (1) SKPK melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian target Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

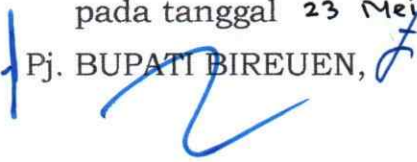


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2023

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 



IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 128

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
1	Memperkuat Pelaksanaan Syariat dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penerapan Syariat Islam	Persen	Rata-rata dari persentase cakupan pembinaan syariat islam, persentase dayah yang terakreditasi, dan persentase sidang yang menghasilkan keputusan	DSI	DPD/Sekretariat MAA	
1.1		Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilaporkan}} \times 100\%$	DSI	Satpol PP dan WH, Sek. MPU	Pelanggaran terhadap Qanun Jinayat
1.2		Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman	Persentase tipe dayah yang naik kelas	Persen	$\frac{\text{Jumlah dayah yang naik kelas}}{\text{Jumlah dayah yang terdata}} \times 100\%$	DPD		Akreditasi dayah oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh
1.3		Meningkatnya Tatanan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami	Jumlah kearifan lokal yang dilestarikan	Adat	Kearifan lokal yang dilestarikan dibawah pembinaan MAA	Sek. MAA		Data yang dikeluarkan oleh MAA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	Setdikab (Bag. Orpeg)	Seluruh SKPK	Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.1		Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Bertanggung Jawab	Opini BPK	WDP/ WTP	Hasil Evaluasi BPK RI	BPKD	Seluruh SKPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
2.2		Meningkatnya Tingkat Maturlitas SPIP	Level Maturlitas SPIP Terintegrasi	Level	Penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP	Inspektorat	Seluruh SKPK	Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2.3		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	Setdikab (Bag. Orpeg)	Seluruh SKPK	Penilaian pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.4		Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE	Diskominfo	Seluruh SKPK	Penilaian pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

[Signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan		Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	$\frac{\text{Pembangunan infrastruktur yang memiliki dokumen lingkungan}}{\text{Jumlah seluruh pembangunan infrastruktur}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Dinas Perkim, Dinas LH Persampahan	
3.1		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	Persen	$(\text{Capaian SPM Sanitasi} + \text{capaian SPM Air Minum} + \text{Capaian SPM Perumahan}) / 3$	Dinas PUPR	Dinkes, Perkim	Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan acuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna
3.2		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arahkan Pola Ruang dan Struktur Ruang	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	Persen	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik} + \text{sedang (km)}}{\text{Panjang jalan Kabupaten(km)}} \times$	Dinas PUPR		Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
			Persentase kesesuaian usulan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi yang dikeluarkan	persen	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah usulan pemanfaatan ruang yang diajukan}} \times 100\%$	Dinas PUPR	DPMPTSP	Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR untuk melengkapi surat PBG IMB yang diterbitkan oleh DPMPTSP
3.3		Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan hutan)	persen	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Dimana: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	DLHK		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan lahan sesuai
3.4		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penurunan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	indeks	$R = (H \times V \times (1 - C))^{1/2}$ Dimana: R = Indeks Resiko H = Indeks Bahaya V = Indeks Kerentanan C = Indeks Kapasitas	BPBD		Indeks Resiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana. Indeks risiko bencana disusun dari komponen bahaya, keterpaparan/kerentanan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana Data yang dikeluarkan oleh BNPB
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	persen	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	Distanbun, DPPKUKM, DPKP, Disnak Keswan	Bappeda	Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
4.1		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	persen	$K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ Dimana: K _{sp} = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor pertanian pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)	Distanbun	DPKP, Disnakeswan	Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen
4.2		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	persen	$K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ Dimana: K _{sp} = Besarnya kontribusi sektor perdagangan pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor perdagangan pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)	DPPKUKM		Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	$K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ Dimana: K _{sp} = Besarnya kontribusi sektor industri pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor industri pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)	DPPKUKM		Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
4.3		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun } n}{\text{Jumlah realisasi pendapatan daerah tahun } n} \times 100\%$	BPKD		Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.
4.4		Berkembangnya Potensi Pariwisata Daerah	Jumlah destinasi wisata	destinasi	Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bireuen	Disporapar	Dimas PK, Dinasos	
4.5		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	indeks	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Keterangan: IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	DPMGPKB	Kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan. Hasil Penilaian dari Kementerian Desa
4.6		Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah peningkatan investasi	Rp. (Milyar)	Jumlah Realisasi Investasi yang di keluarkan oleh dinas penanaman modal	DPMPTSP		

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
4.7		Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi	Laju inflasi	Persen	Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	Setdakab (Bagian perekonomian)	DPKP, Distanbun, DPPKUKM, Disnakeswa n	Angka inflasi merujuk ke daerah terdekat (Kota Lhokseumawe)
5	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Dimana: 1. Kesehatan $I_{Kesehatan} = \frac{AHH_{nada} - AHH_{nada}}{AHH_{nada} - AHH_{nada}}$ 2. Pendidikan terdiri dari dua komponen rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). $I_{RLS} = \frac{RLS_{nada} - RLS_{nada}}{RLS_{nada} - RLS_{nada}}$ $I_{HLS} = \frac{HLS_{nada} - HLS_{nada}}{HLS_{nada} - HLS_{nada}}$ Indeks dari kedua komponen tersebut diberi bobot yang sama dalam menyusun indeks pendidikan. $I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ 3. Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{nada})}{\ln(PPP_{nada}) - \ln(PPP_{nada})}$	Dinas PK Dinas Kesehatan	Bagian Perekonomia n, Dinas Perpus Arsip, MP A, RSUD dr. Fauziah, Disporapar, DPMGPKB	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya (Sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen)

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
5.1		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas Xi = Lama Sekolah penduduk ke-1 yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas PK	Sek MPA, Dinas Perpustakaan	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditawarkan. Sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen
5.2			Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS = \sum_{i=7}^k \frac{E_i}{P_i}$ HLS = Harapan Lama Sekolah Pi = Jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas Ei = Jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas	Dinas PK	Sek MPA	Harapan lama sekolah (expected years of schooling) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen
5.3		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Dinkes	RSUD dr. Fauziah	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria	
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab			
						PD Utama	PD Pendamping		
								kemiskinan. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)	
5.4		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	indeks	$SDI = \frac{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4)}{4}$ SDI = Indeks Pembangunan Olahraga D1 = Dimensi partisipasi D2 = Dimensi ruang terbuka D3 = Dimensi angka kebugaran D3 = Dimensi SDM	Disporapar		Indeks Pembangunan Olah Raga dihitung dengan cara menghitung rata-rata indeks gabungan dari setiap dimensi.	
			Persentase pemuda berprestasi	persen	$\frac{\text{Jumlah pemuda berprestasi}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Disporapar			
5.5		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Dimensi	Indikator	DPMGPKB		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. (sumber data : Rilis BPS)
					Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan			
					Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manager, staf administrasi pekerja profesional dan teknis, laki-laki dan perempuan			
					Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan			
			Kabupaten Layak	peringkat	Hasil evaluasi dari Kemen PPPA		DPMGPKB	Penghargaan KLA diberikan kepada	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
			Anak				daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA, tim dari Kementerian/Lembaga dan tim independen. Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya bermuara kepada Penghargaan KLA yang terdiri dari 5 peringkat, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.	
5.6		Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Hasil Evaluasi dari BRIN	Bappeda		Komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 78 indikator, angka indeks merupakan agregat dari seluruh variabel yang digunakan. Karena variabel mempunyai strata. (nilai Indeks Daya Saing Daerah dikeluarkan oleh BRIN)
6	Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan		Indeks Gini	Indeks	$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2 \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$ Where: - G = Gini coefficient - x = Income, income or wealth - n = Total number of observations - x_i and x_j = The value of an individual's income or wealth	Bappeda		Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1.

Am-1

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
								Sumber Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen
					$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$			Persentase penduduk miskin (P0) adalah perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah. Dari rumus sederhana ini, maka langkah pertama adalah menghitung berapa jumlah penduduk miskin. Artinya harus ada sebuah ukuran untuk menentukan siapa yang disebut sebagai orang miskin
6.1	Mengurangi Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	Dimana : $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1,2,3,...,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = Jumlah penduduk	Dinsos	Disnakertrans, Setdakab (Bag. Kesra)	Sumber Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	
6.2	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persen	Rata – rata capaian SPM bidang Sosial $\frac{\text{Rata – rata target SPM bidang sosial}}{\text{Rata – rata capaian SPM bidang Sosial}} \times 100\%$	Dinsos		Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna.	
6.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi- umbian + + skor PPH kelompok lain-lain	DPKP	Distanbun	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari	

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
								kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan. Merupakan data dari susenas (BPS).
7	Menurunkan Angka Pengangguran		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Disnakertrans		Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja Sumber Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen
7.1		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Populasi usia kerja}} \times 100\%$	Disnakertrans		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas Sumber Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen
8	Meningkatkan Ketentrangan, Ketertiban Umum, dan		Indeks Kasus Ketentrangan dan Ketertiban	indeks	$IKKK = \frac{\text{Indeks (K1 + K2 + K3 + K4)}}{4}$ IKKK = Indeks Kasus Ketentrangan dan Ketertiban	SatPol PP & WH	Bankesbangol	Nilai indeks yang diharapkan mendekati 0 yang artinya semakin berkurangnya kasus ketentrangan dan ketertiban

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
					Formulasi / Rumus Perhitungan	Penanggungjawab		
						PD Utama	PD Pendamping	
Perlindungan Masyarakat				K1 = Indeks Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				K2 = Indeks Kasus Penegakan Perda				
				K3 = Indeks Kasus Syariah				
				K4 = Indeks Kasus Konflik				
8.1	Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase konflik yang diselesaikan	persen	$\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan tahun (n)}}{\text{jumlah konflik tahun (n)}} \times 100\%$	Bankesbangpol	SatPol PP & WH		
8.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berpolitik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih}}{\text{jumlah penduduk yang memiliki hak pilih}} \times 100\%$	Bankesbangpol	SatPol PP & WH	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEEN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEEN TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN BIREUEEN
1. DINAS PENDIDIKAN DAYAH

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan Keislaman			Persentase Tipe Dayah yang Naik Kelas	Persen	$\frac{\text{Jumlah dayah yang naik kelas}}{\text{Jumlah dayah yang terdata}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan		Jumlah Dayah yang Terakreditasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah dayah yang terakreditasi}}{\text{Jumlah dayah yang terdata}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah yang Terakreditasi	Dayah	Akreditasi Dayah yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA)



2. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Peran MPA dalam Pembangunan Pendidikan			Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS = \sum_{i=7}^k \frac{E_i}{P_i}$ HLS = Harapan Lama Sekolah Pi = Jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas Ei = Jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas
2.1		Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah		Jumlah Komite sekolah yang aktif menjalankan fungsinya		Hasil evaluasi dari Tim Monev MPA Kabupaten
2.1.1			Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Berkarakter	Persen	$\frac{\text{Jumlah sekolah dan dayah yang menerapkan pendidikan karakter}}{\text{Jumlah sekolah dan dayah seluruhnya}} \times 100\%$

3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat			Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi$ RLS = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas Xi = Lamasekolah penduduk ke-1 yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
2.1		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah Dasar 9 Tahun	Tahun	Data yang dirilis oleh BPS
2.1.1			Program Pengelolaan Pendidikan	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persen	Data yang dirilis oleh BPS
2.1.2			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal	Persen	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal (SD, SMP)}}{\text{Jumlah sekolah di Kab. Bireuen (SD, SMP)}} \times 100\%$
2.1.3			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen	$\frac{\text{Jumlah guru yang berkompentensi}}{\text{Jumlah guru di Kab. Bireuen}} \times 100\%$

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3	Meningkatkan Tataan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami			Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Kelompok	Jumlah kelompok kesenian yang dibina
3.1		Meningkatnya promosi kesenian dan budaya daerah		Jumlah even kesenian dan budaya daerah	Even	Jumlah even kesenian dan budaya daerah
3.1.1			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang di revitalisasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah karya budaya yang direvitalisasi}}{\text{Jumlah karya budaya yang terdata}} \times 100\%$
3.1.2			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina	Persen	$\frac{\text{Jumlah sanggar yang dibina}}{\text{Jumlah sanggar dibawah naungan DKA}} \times 100\%$
4	Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah			Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi	Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bireuen
4.1		Berkembangnya potensi pariwisata daerah		Jumlah objek wisata budaya yang dikelola	objek	Jumlah objek wisata budaya yang dikelola oleh Dinas PK
4.1.1			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah situs atau cagar budaya yang dibina}}{\text{total situ atau cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$
4.1.2			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang dikelola	Persen	$\frac{\text{Jumlah museum yang dikelola}}{\text{Jumlah museum di Kab. Bireuen}} \times 100\%$

4. DINAS KESEHATAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat			Angka harapan hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
2.1		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan		Skor IKM	Skor	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
2.1.1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SPM bidang kesehatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah SPM bidang kesehatan yang tercapai}}{\text{Jumlah SPM bidang kesehatan}} \times 100\%$
2.1.2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$
2.1.3			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman yang mendapatkan Izin dari Dinas Kesehatan Kab. Bireuen yang mendapatkan izin	Sarana	Jumlah Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman yang mendapatkan Izin dari Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
2.1.4			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM yang Aktif	UKBM	Jumlah UKBM yang Aktif

5. RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat			Angka harapan hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
2.1		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan		Skor IKM	Skor	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
2.1.1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	$\frac{\text{SPM bidang Kesehatan yang tercapai}}{\text{Jumlah SPM Bidang Kesehatan}} \times 100\%$
2.1.2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan}} \times 100\%$

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	$Ksp = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ Dimana: Ksp = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor pertanian pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
2.1		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Total jaringan irigasi}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Total jaringan irigasi}} \times 100\%$

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar			Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	Persen	$\frac{\text{Capaian SPM Sanitasi} + \text{Air Minum} + \text{Perumahan}}{3}$
3.1		Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak		Rata-rata cakupan akses Air Minum dan Sanitasi Layak	Persen	Rata-rata cakupan akses air minum dan persentase KK dengan akses sanitasi layak
3.1.1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum	Persen	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah KK di Kab. Bireuen}} \times 100\%$
3.1.2			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan akses sanitasi layak	Persen	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sanitasi layak}}{\text{Jumlah KK di Kab. Bireuen}} \times 100\%$
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arah Pola Ruang dan Struktur Ruang			Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik} + \text{sedang (km)}}{\text{Panjang jalan (km)}} \times 100\%$
4.1		Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik		Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten} + \text{jembatan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten} + \text{jembatan}} \times 100\%$
4.1.1			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
4.2		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Penyedia Jasa Kontruksi		Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa konstruksi yang bersertifikat}} \times 100\%$

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
4.2.1			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di Kab. Bireuen}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi atau analis Kab. Bireuen}} \times 100\%$
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arah Pola Ruang dan Struktur Ruang			Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah usulan pemanfaatan ruang yang diajukan}} \times 100\%$
5.1		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase		Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang drainase}} \times 100\%$
5.1.1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Wilayah Genangan Yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Luas genangan yang tertangani}}{\text{Luas genangan}} \times 100\%$
5.2		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pusat Kegiatan dan Kawasan Strategis		Jumlah rekomendasi persetujuan bangunan gedung	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi persetujuan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR
5.2.1			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang terbangun	Persen	$\frac{\text{Jumlah gedung yang dibangun dengan sumber dana APBD}}{\text{Jumlah target pembangunan gedung}} \times 100\%$
5.2.2			Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Persentase Gedung dan lingkungannya yang terpelihara	Persen	$\frac{\text{Jumlah gedung dan lingkungan yang terpelihara}}{\text{Jumlah target gedung dan lingkungannya yang dipelihara}} \times 100\%$
5.2.3			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai/ tidak sesuai	Penyesuaian berdasarkan rekomendasi teknis

Am 1

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
4.1.1			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase lokasi taman makam pahlawan yang dikelola pahlawan yang dikelola	Persen	$\frac{\text{Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dikelola}}{\text{Jumlah lokasi taman makam pahlawan}} \times 100\%$

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Kesempatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Populasi usia kerja}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Persentase Pencari kerja yang Memiliki Kompetensi	Persen	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi	Persen	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi}}{\text{Jumlah peserta yang mengikuti ujian kompetensi}} \times 100\%$

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan			Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + + skor PPH kelompok lain-lain
2.1		Terjaganya ketersediaan dan keamanan pangan		Nilai Ketersediaan Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Daging, Telur, Susu, Ikan) pada tahun berkenaan	Skor	Nilai Ketersediaan Pangan
2.1.1			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedauletan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	Persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan (beras)(ton)}}{\text{Jumlah kebutuhan selama 1 tahun (beras)(ton)}} \times 100\%$
2.1.2			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	Persen	$\frac{\text{Jumlah KWT yang dibina}}{\text{Jumlah KWT}} \times 100\%$
2.1.3			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa rawan pangan yang ditangani}}{\text{Jumlah desa rawan pangan}} \times 100\%$
2.1.4			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	$\frac{\text{Jumlah sampel}}{\text{Jumlah target sampel yang diperiksa}} \times 100\%$

Am-1

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	Dimana: $K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ K_{sp} = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor pertanian pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah) Jumlah produksi perikanan tahun n – jumlah produksi perikanan tahun (n – 1) Jumlah produksi perikanan tahun (n – 1) X 100%
3.1		Meningkatnya produksi perikanan		Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	
3.1.1			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Bireuen
3.1.2			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Bireuen
3.1.3			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	Jumlah pengendalian dan pengawasan kasus yang ditangani Jumlah kasus yang dilapor X 100%
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Triliun Rupiah	Dimana: $K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ K_{sp} = Besarnya kontribusi sektor industri pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor industri pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
4.1		Meningkatnya usaha industri pengolahan perikanan		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Unit	Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Bireuen
4.1.1			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Bireuen



13. DINAS PERTANAHAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan			Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	$\frac{\text{Pembangunan infrastruktur yang memiliki dokumen lingkungan}}{\text{Jumlah seluruh pembangunan infrastruktur}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arah dan Pola Ruang dan Struktur Ruang		Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah usulan pemanfaatan ruang yang diajukan}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah yang dikoordinasikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah pengadaan tanah yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah pengadaan tanah yang diajukan}} \times 100\%$
2.1.2			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan yang tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang dilaporkan}} \times 100\%$

dm-9

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1.3			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Direistribusi	Persen	$\frac{\text{Luas tanah terlantar dan absente yang diretribusi}}{\text{luas tanah terlantar/absente}} \times 100\%$
2.1.4			Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kawasan yang sesuai dengan Peruntukannya	Persen	$\frac{\text{Luas tanah yang sesuai dengan peruntukannya}}{\text{Luas tanah seluruhnya}} \times 100\%$
2.1.5			Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Persentase Tanah yang Bersertifikat	Persen	$\frac{\text{jumlah bidang tanah penda yang bersertifikat}}{\text{jumlah seluruh bidang tanah penda}} \times 100\%$
2.1.6			Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Ada/ Tidak	ada apabila terdapat data informasi pertanahan Kab. Bireuen dalam sistem informasi pertanahan
2.1.7			Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang ditangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik dan sengketa yang ditangani tahun n}}{\text{Jumlah kasus konflik dan sengketa yang dilaporkan tahun n}} \times 100\%$

14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2	Tertaksananya Pengembangan Sistem Pemantauan Ekologis yang berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Dimana: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
2.1		Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup		Peningkatan Indeks Kualitas Air	Persen	Hasil Laporan Pengujian Kualitas Air dan Udara
2.1.1			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persen	Nilai relatif = $\frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ $0 \leq PI_i \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_i \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_i \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_i > 10,0 \rightarrow$ cemar berat
2.1.2			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen	Jumlah Ketaatan terhadap izin Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi Dimana: Ketaatan terhadap izin serta pengawasan terdiri dari : - Izin lingkungan, - izin PPLH, dan - PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang ditangani

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1.3			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang dbina	Persen	$\frac{\text{Jumlah MHA yang dbina}}{\text{Jumlah MHA di Kabupaten Bireuen}} \times 100\%$
2.1.4			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyulahan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Gampong Iklim	Gampong	Jumlah Gampong yang mendaftar di Aplikasi Proklim
2.1.5			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup Yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup}} \times 100\%$
2.1.6			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah timbulan sampah yang ditangani tahun } n}{\text{Jumlah total timbulan sampah tahun } n} \times 100\%$
2.1.7			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen Perencanaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak	Ada apabila tersusun dokumen perencanaan lingkungan hidup
2.2		Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Secara Berkesinambungan		Terlaksananya Perawatan Ruang Terbuka Hijau	Persen	$\frac{\text{Luas RTH yang ditangani}}{\text{Rencana Luas RTH Kabupaten(RTRW)}} \times 100\%$
2.2.1			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	Persentase RTH yang Ditangani	Persen	$\frac{\text{Luas RTH yang ditangani}}{\text{Rencana Luas RTH Kabupaten(RTRW)}} \times 100\%$

Am-1

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
1.2		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan		Cakupan kepemilikan Administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	Rata-rata cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan cakupan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen
1.2.1			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persen	$\frac{\text{Jumlah penerbitan KTP + penerbitan KIA + Penerbitan KK + penerbitan SKPPWNI}}{\text{Jumlah dokumen yang ditargetkan}} \times 100\%$
1.2.2			Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen	Dimana: $\frac{A + B + C + D}{4}$ A = Cakupan Akta Kelahiran $\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah anak DKB Smt Terakhir}} \times 100\%$ B = Cakupan Akta Kematian $\frac{\text{Jumlah penduduk status mati yang memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah penduduk yang dilaporkan meninggal}} \times 100\%$ C = Cakupan Akta Perkawinan $\frac{\text{Jumlah penduduk status kawin yang berisi nomor buku nikah}}{\text{Jumlah penduduk status kawin}} \times 100\%$ D = Cakupan Akta Perceraian $\frac{\text{Jumlah penduduk status cerai hidup yang terisi nomor akta}}{\text{Jumlah penduduk status cerai hidup}} \times 100\%$

Handwritten signature

1.2.3			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya database Kependudukan	Ada/ Tidak	Ada apabila terdapat database kependudukan pada aplikasi SIAK
1.2.4			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada/ Tidak	Ada apabila tersusun dokumen profil kependudukan

16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KB

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penujangan urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. (sumber data : Rilis BPS)
2.1		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang berprofesi sebagai ASN}}{\text{Total ASN}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah organisasi wanita yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi wanita}} \times 100\%$

[Signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.2		Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		Rasio KDRT	Rasio	$\frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga dalam Kab. Bireuen}}$
2.2.1			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan}} \times 100\%$
2.3		Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah anak dalam Kab. Bireuen}}$
2.3.1			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus keseluruhan}} \times 100\%$
3	Laju Pertumbuhan Penduduk Terkendali			Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah Penduduk Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } (n-1)} \times 100\%$
3.1		Kelahiran Penduduk Terkendali		Rata-Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	Anak	$\frac{\text{Jumlah kelahiran per 1000 wanita}}{\text{Jumlah wanita kelompok usia (15 - 49 tahun)}} \times 100\%$
3.1.1			Program Pengendalian Penduduk	Adanya ketersediaan sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, advokasi keluarga	Ada/ Tidak	Apabila ketersediaan sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, advokasi keluarga
3.1.2			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	Persen	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$
3.1.3			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Desa yang memiliki kelompok Tribina	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa tribina}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$

Am-9

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
4	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Forum Ketahanan Keluarga	Persen	Hasil evaluasi dari Kemen PPPA
4.1		Meningkatnya Pembinaan Organisasi Perempuan		Organisasi Perempuan Aktif	Organisasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif
4.1.1			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa yang dibina BKMT	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa yang dibina}}{\text{Jumlah desa seluruhnya}} \times 100\%$
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Kabupaten Layak Anak	Kabupaten	Hasil evaluasi dari Kemen PPPA
4.2		Meningkatnya Gampong Layak Anak		Jumlah Gampong Layak Anak		Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Gampong Layak Anak
4.2.1			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	$\frac{\text{Jumlah gampong Layak anak}}{\text{Jumlah seluruh gampong}} \times 100\%$
5	Meningkatkan Kemandirian Desa			Indeks Desa Membangun	Indeks	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan. Data dikeluarkan oleh Kementerian Desa
5.1		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa		Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal		Data Rilis Kementerian Desa
5.1.1			Program Penataan Desa	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong	Ada/Tidak	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong oleh DPMGPKB
5.1.2			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan dan Sistem pengelolaan keuangan yang baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintahan yang baik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
6	Meningkatkan Tataan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami			Jumlah Kearifan Lokal yang Diestarikan	Adat	Jumlah adat istiadat yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen
6.1		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Adat		Jumlah Desa yang Menggunakan Lembaga Adat	Desa	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMGPKB
6.1.1			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif

17. DINAS PERHUBUNGAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemmen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan konektivitas antar daerah			Rasio konektivitas daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan pedesaan yang ada}}{\text{Jumlah trayek angkutan pedesaan yang dibutuhkan}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya angkutan umum laik jalan		Persentase Angkutan Umum Laik Jalan	Persen	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang melaksan uji berkala tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum yang wajib uji berkala tahun n}} \times 100\%$

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1.1			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	$\frac{\text{volume kendaraan}}{\text{kapasitas jalan}}$

18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Informasi Publik.			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Informasi Publik.	Indeks	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
2.1		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi.		Persentase PPIID SKPK yang Aktif.	Persen	$\frac{\text{Jumlah PPIID SKPK yang Aktif}}{\text{Jumlah SKPK}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Aceh (KIA).
2.1.2			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi e-government yang digunakan SKPK	Aplikasi	Survey Pendataan Jumlah Aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

Am 1

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.2		Tersedianya Data Statistik Kabupaten.		Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tidak	Ada / Tidak Tersedianya Buku Kabupaten Bireuen Dalam Angka.
2.2.1			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral.	Ada/ Tidak	Ada / Tidak Tersedianya Dokumen Data Statistik Sektoral.
2.3		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah.		Jumlah SKPK yang Telah Menerapkan Layanan Keamanan Informasi.	SKPK	Survey Pendataan Jumlah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang Telah Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen
2.3.1			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah.	Persen	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan TTE}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2	Meningkatkan Nilai Investasi			Jumlah Peningkatan Investasi		Jumlah Realisasi Investasi yang di keluarkan oleh dinas penanaman modal
2.1		Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif		Jumlah Pelaku Investasi	Pelaku Investasi	Jumlah pelaku investasi yang terdaftar pada DPMPPTSP
2.1.1			Program Pengembangan Iklim Penanaman Moda	Kebijakan iklim penanaman modal	Ada/ Tidak	Kebijakan iklim penanaman modal berupa Peraturan daerah yang mengatur tentang penanaman modal
2.1.2			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah peningkatan usaha yang memiliki izin	Usaha	Jumlah usaha yang memiliki izin (sumber data dari DPMPPTSP)
2.1.3			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM	Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM (sumber data dari DPMPPTSP)
2.1.4			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya pengolahan data penanaman modal secara elektronik	Ada/ Tidak	Data penanaman modal yang terdapat dalam aplikasi elektronik
2.2		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan perizinan		Skor IKM	Skor	Hasil survey kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan DPMPPTSP
2.2.1			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin (sumber data dari DPMPPTSP)

20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah $SDI = \frac{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4)}{4}$ SDI = Indeks Pembangunan Olahraga D1 = Dimensi partisipasi D2 = Dimensi ruang terbuka D3 = Dimensi angka kebugaran D3 = Dimensi SDM
2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga			Indeks Pembangunan Olahraga	Persen	$\frac{Organisasi Pemuda yang aktif}{Jumlah seluruh Organisasi Pemuda} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	$\frac{Organisasi Pemuda yang aktif}{Jumlah seluruh Organisasi Pemuda} \times 100\%$
2.1.1			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang dibina	Persen	$\frac{Organisasi Pemuda yang dibina}{Jumlah seluruh Organisasi Pemuda} \times 100\%$
2.2		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga		Jumlah keikutsertaan masyarakat pada berbagai event olahraga	Orang	Jumlah keikutsertaan masyarakat pada berbagai event olahraga
2.2.1			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabor	Jumlah Cabang Olah Raga yang Mendapatkan Pembinaan
2.2.2			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kepramukaan Aktif	Persen	$\frac{Jumlah Gugus yang aktif}{Jumlah gugus pramuka di Kab. Bireuen} \times 100\%$



No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3.	Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah			Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi	Data yang ditulis oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
3.1		Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata		Jumlah Lokasi Destinasi Wisata yang ditingkatkan	Lokasi	Jumlah lokasi destinasi wisata yang dipelihara
3.1.1			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata yang baik}}{\text{Jumlah destinasi wisata}} \times 100\%$
3.2		Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata		Persentase Kunjungan Wisata	Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi kunjungan wisata}}{\text{Jumlah target kunjungan wisata}} \times 100\%$
3.2.1			Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi promosi wisata}}{\text{Jumlah target promosi wisata}} \times 100\%$
3.3		Meningkatnya Kapasitas & Kapabilitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Jenis Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	Jenis	Jumlah Jenis Bisnis Ekonomi Kreatif yang difasilitasi
3.3.1			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi pelaku ekonomi kreatif yang dibina}}{\text{Jumlah target pelaku ekonomi kreatif yang dibina}} \times 100\%$

21. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemmen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penujangan urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Tatapan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami			Jumlah adat istiadat yang dibina dan dilestarikan	Adat	Data yang dikeluarkan oleh MAA Kab. Bireuen berdasarkan SK Kepala sekretariat
2.1		Meningkatnya promosi kesenian dan budaya daerah		Jumlah even kesenian dan budaya daerah yang diikuti	Even	even kesenian dan budaya daerah yang diikuti oleh MAA Kab. Bireuen
2.1.1			Program Sekretariat Majelis Adat Aceh	Jumlah Kearifan Lokal yang dilaksanakan	Adat	Rilis data dari MAA Kab. Bireuen

22. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penujangan urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Minat Baca			Persentase Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Persen	$\frac{\text{Jumlah pemustaka tahun } n - \text{jumlah pemustaka tahun } (n - 1)}{\text{jumlah pemustaka tahun } (n - 1)} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan		Cakupan Wilayah Pelayanan Perpustakaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang dilayani}}{\text{jumlah perpustakaan yang seharusnya dilayani}} \times 100\%$

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1.1			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah penunjang perpustakaan	Orang	Jumlah Seluruh Pemustaka dibawah binaan Perpustakaan Daerah
3	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	Indeks	Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE
3.1		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip berbasis Elektronik	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang aktif pada aplikasi Srikandi}}{\text{Jumlah OPD dalam Kab. Bireuen}} \times 100\%$
3.1.1			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	$\frac{\text{Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD dalam Kab. Bireuen}} \times 100\%$

23. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	$K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100 \%$ Dimana: K_{sp} = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor pertanian pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
2.1	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya Genetik (SDG)			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan	Persen	Dimana : a = Jumlah Produksi tananaman pangan pada tahun n b = Jumlah produksi tanaman pangan pada tahun (n-1) $= \frac{a-b}{b} \times 100\%$
2.1.1			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase rata-rata Peningkatan produksi tanaman pangan (Pajale) dan tanaman perkebunan (Kelapa, Karet dan Kakao)	Persen	Peningkatan produksi Padi+Peningkatan produksi Jagung+Peningkatan produksi Kedelai+Peningkatan produksi Kelapa+Peningkatan produksi Karet+Peningkatan produksi Kakao/6
2.2		Peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB		Jumlah Peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Triliun Rupiah	Nilai PDRB tahun n - Nilai PDRB tahun (n-1)
2.2.1			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	Triliun Rupiah	Sumber Data dari BPS
2.3		Pengurangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim (DPI)		Produktifitas rata-rata tanaman padi	Persen	$\frac{\text{Total Produksi (Ton)}}{\text{Total Luas Panen(Ha)}} \times 100\%$

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.3.1			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	$\frac{\text{Luas Serangan OPT dan DPI ditanggulangi}}{\text{total Luas Serangan OPT dan DPI}} \times 100\%$
		Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Tani		Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Kelompok Tani	Penilaian dari Tim Penilai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bireuen
2.3.2			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani yang Dibina}}{\text{Jumlah Kelompok Tani}} \times 100\%$

24. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Pengujiang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Pengujiang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program pengujiang urusan pemerintah daerah}}{\text{urusan pemerintah daerah}} \times 100\%$
2	Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak			Jumlah populasi ternak	Ekor	Hasil Pendataan Populasi Ternak dalam Kabupaten Bireuen
2.1		Meningkatnya Hasil produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Persen	Dimana : $= \frac{a-b}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Produksi pada tahun n b = Jumlah Produksi pada tahun (n-1)

ms

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1.1			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase rata-rata Peningkatan Populasi Ternak	Persen	Dimana : $= \frac{a + b + c}{3}$ a = Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi b = Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kerbau c = Persentase Peningkatan populasi ternak kambing
2.1.2			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	Persen	Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani $\frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani}} \times 100\%$
2.2		Meningkatnya PAD Bidang Peternakan		Persentase Peningkatan PAD Sektor Peternakan	Persen	Dimana : $= \frac{a-b}{b} \times 100\%$ a = Jumlah PAD pada tahun n b = Jumlah PAD pada tahun (n-1)
2.2.1			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi HPT	Persen	Dimana : $= \frac{a-b}{b} \times 100\%$ a = Jumlah HPT pada tahun n b = Jumlah HPT pada tahun (n-1)

Handwritten signature

25. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah $K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100\%$
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri			Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Triliun Rupiah	Dimana: K_{sp} = Besarnya kontribusi sektor perdagangan pada tahun ke-t (%) $PDRBs$ = PDRBp sektor perdagangan pada tahun ke-t (rupiah) $PDRBt$ = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah) Jumlah UMKM tahun n – Jumlah UMKM Tahun (n – 1) $\frac{\text{Jumlah UMKM tahun } n - \text{Jumlah UMKM Tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah UMKM Tahun } (n - 1)} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya jumlah UMKM		Peningkatan Jumlah UMKM	Persen	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang diberdayakan}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah UMKM yang diberdayakan	Persen	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang Naik Kelas}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$
2.1.2			Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	Persen	$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada}} \times 100\%$
2.2		Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Persentase Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.2.1			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	Persen	$\frac{a-b}{b} \times 100\%$ a = Jumlah perusahaan yang memiliki perizinan dan pendaftaran tahun n b = Jumlah perusahaan yang memiliki perizinan dan pendaftaran tahun (n-1)
2.2.2			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	Persen	$\frac{\text{Jumlah sarana perdagangan yang dikelola dan berfungsi}}{\text{Jumlah sarana perdagangan yang dikelola}} \times 100\%$
2.2.3			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk unggulan daerah yang dipromosikan	Persen	$\frac{\text{Produk unggulan daerah yang dipromosikan}}{\text{Jumlah produk unggulan daerah}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	Dimana: $K_{sp} = \frac{PDRBs}{PDRBt} \times 100\%$ K_{sp} = Besarnya kontribusi sektor industri pada tahun ke-t (%) PDRBs = PDRBp sektor industri pada tahun ke-t (rupiah) PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah) $\frac{\text{Jumlah koperasi tahun } n - \text{Jumlah koperasi Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah koperasi Tahun } (n-1)} \times 100\%$
3.1		Meningkatnya Jumlah Koperasi		Peningkatan jumlah koperasi	Persen	
3.1.1			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$
3.1.2			Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang Aktif}} \times 100\%$
3.1.3			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah}}{\text{Jumlah KSP dan USP di Kab. Bireuen}} \times 100\%$

Handwritten signature

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3.1.4			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	Persen	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang aktif}} \times 100\%$
3.1.5			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Yang Dinilai	Persen	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang dinilai}}{\text{Jumlah koperasi yang Aktif}} \times 100\%$
3.2		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri		Persentase peningkatan jumlah IKM	Persen	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah IKM Tahun } (n - 1)} \times 100\%$
3.2.1			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pelaku Industri yang difasilitasi	Persen	$\frac{\text{Pelaku Industri yang difasilitasi}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$
3.2.2			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya data industri dalam sistem Informasi industri Nasional (SINAS)	Ya/ Tidak	Pelaku Usaha Industri Mendaftarkan Usahanya sendiri di Aplikasi SINAS
4	Meningkatkan terrib niaga, terrib ukur dan kepastyan berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan baeang dan jasa			Kontribusi Terhadap Stabilitas Harga dan Perlindungan konsumen	Ya/ Tidak	Dilakukannya Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Sebanyak 137 Komoditi dan Kepastian Penggunaan Alat UTTP
4.1		Terkendalnya harga barang pokok dan barang penting lainnya dan meningkatnya UTTP yang ditera		Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Meningkatnya Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Alat UTTP	Ya/ Tidak	Terkendalnya harga barang pokok dan barang penting lainnya berdasarkan angka inflasi ideal antara 2 persen - 4 persen
4.1.1			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ya/ Tidak	Terkendalnya harga barang pokok dan barang penting lainnya berdasarkan angka inflasi ideal antara 2 persen - 4 persen

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
4.1.2			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTTP yang telah diterima	Persen	$\frac{\text{Jumlah UTTTP yang telah tera ulang}}{\text{Jumlah potensi UTTTP}} \times 100\%$

26. SEKRETARIAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah hasil pemantauan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan			Persentase tindak lanjut hasil pemantauan	Persen	$\frac{\text{Jumlah hasil pemantauan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pemantauan}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya kinerja perekonomian dan pembangunan kabupaten		Cakupan kinerja bagian perekonomian dan SDA, Administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja pada program perekonomian dan pembangunan dan program}}{\text{Jumlah hasil pemantauan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
2.1.1			Program Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Perekonomian dan Pembangunan	Persen	$\frac{\text{capaian kegiatan a + capaian kegiatan b + ... n}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$

[Handwritten signature]

2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan keistimewaan aceh		Nilai LPPD Kabupaten	Kategori	Hasil Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
2.1		Meningkatnya kinerja bidang pemerintahan dan keistimewaan aceh	Cakupan kinerja bagian kesejahteraan rakyat, tata pemerintahan dan hukum	Persen	Persentase rata-rata kinerja pada program pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.1.1		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persen	$\frac{\text{Capaian kegiatan a} + \text{Capaian kegiatan b} + \dots + \text{Capaian kegiatan n}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$

27. SEKRETARIAT DPRK

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Bertanggung Jawab			Opini BPK	WDP/ WTP	Hasil Evaluasi BPK RI
2.1		Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Legislasi		Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Apabila terdapat Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJM maupun RKPD

msf

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1.1			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Fasilitasi kegiatan DPRD terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan penganggaran

28. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan Serta Layanan Publik Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	Indeks	Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE



No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1		Tertelaksananya Konsistensi Antar Dokumen		Indeks Perencanaan	Persen	Dimana : Rencana pembangunan daerah adalah keselarasan indikator pada masing-masing dokumen perencanaan yang diukur: $(\%) \text{ keselarasan muatan RPKP dengan RPJM} = \frac{\text{Jumlah program dalam RPKP}}{\text{Jumlah program dalam RPJM}} \times 100\%$ $(\%) \text{ keselarasan muatan Renja SKPK dengan RPKP} = \frac{\text{Jumlah kegiatan dalam renja SKPK}}{\text{Jumlah kegiatan dalam RPKP}} \times 100\%$ $(\%) \text{ keselarasan muatan RKA SKPK dengan RPKP} = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan dalam RKA SKPK}}{\text{Jumlah sub kegiatan dalam RPKP}} \times 100\%$
2.1.1			Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/perkada	Ada/ Tidak	Ada apabila tersedia dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada
2.1.2			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program antara RPJM dengan APBD	Persen	$\frac{\text{Jumlah program dalam APBD}}{\text{Jumlah program dalam RPJM}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Daya Saing Daerah			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Hasil Evaluasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3.1		Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah		Persentase Kebijakan Inovasi yang dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang dikembangkan pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh kebijakan inovasi}} \times 100\%$
3.1.1			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase SKPK yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen	$\frac{\text{Jumlah SKPK yang melaksanakan penelitian dan pengembangan}}{\text{Jumlah SKPK}} \times 100\%$

29. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penujangan urusan pemerintah daerah
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Bertanggung Jawab			Opini BPK	WDP/ WTP	Hasil Evaluasi BPK RI
2.1		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Penyusunan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu/ Tidak tepat waktu	Per 31 Desember
2.1.1			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran belanja}}{\text{Jumlah anggaran}} \times 100\%$

Am

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.2		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset		Persentase BMD sesuai dengan Nilai Perolehan	Persen	Hasil Persentase BMD yang diperoleh di tahun n
2.2.1			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah aset daerah yang berfungsi}}{\text{Jumlah aset daerah yang terdapat}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun n}}{\text{Jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n}} \times 100\%$
3.1		Tercapainya Target PAD		Pendapatan Potensi PAD	WP PBB	Jumlah WP PBB
3.1.1			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD pada tahun n}}{\text{Jumlah target PAD tahun n}} \times 100\%$

30. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penujangan urusan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah realisasi PAD pada tahun n}} \times 100\%$
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	Indeks	Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE

msf

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1.2.1			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	Persen	$\frac{\text{Jabatan yang terisi sesuai dengan kebutuhan}}{\text{Jabatan yang dibutuhkan}} \times 100\%$
1.2.2			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	Persen	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$

31. INSPEKTORAT

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1				Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Pengujiang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Pengujiang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program pengujiang urusan pemerintah daerah}}{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program pengujiang urusan pemerintah daerah}} \times 100\%$
2	Meningkatkan Tingkat Maturitas SPIP			Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	$\frac{\text{Penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP}}{\text{Penilaian tingkat K-kapabilitas APPIP oleh BPKP sebagai instansi pembina}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya Fungsi Pengawasa		Level K-kapabilitas APPIP	Level	$\frac{\text{Penilaian tingkat K-kapabilitas APPIP oleh BPKP sebagai instansi pembina}}{\text{Penilaian tingkat K-kapabilitas APPIP oleh BPKP sebagai instansi pembina}} \times 100\%$
2.1.1			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\%$
2.1.2			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapat pendampingan	Persen	$\frac{\text{Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$



32. KECAMATAN

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
1.2		Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan		Nilai IKM	Kategori	
1.2.1			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah koordinasi yang ditargetkan}} \times 100\%$
1.2.2			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penyelenggaraan pemerintahan Umum
2	Meningkatkan Kemandirian Desa			Indeks Desa Membangun Kecamatan	Indeks	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan. Data dikeluarkan oleh Kementerian Desa
2.1		Meningkatnya kemandirian desa di Kecamatan		Persentase desa maju dan mandiri	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa maju dan mandiri}}{\text{Jumlah desa dalam Kab. Bireuen}} \times 100\%$
2.1.1			Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif(PKK dan BUMG)}}{\text{Jumlah lembaga ekonomi masyarakat}} \times 100\%$
2.1.2			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$



33. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai, Tentram, Partisipatif, Demokratis dan Beretika			Aspek Kebebasan Sipil	Indeks	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Informasi Publik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
2.1		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Bela Negara		Indeks Pemahaman Ideologi	Indeks	Penilaian hasil kuesioner melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
2.1.1			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	$\frac{\text{Rata rata hasil pre test}}{\text{rata rata hasil post test}} \times 100\%$
2.2		Meningkatnya Peran Orkemas dalam Pemberdayaan Stabilitas Pembangunan		Indeks Data Ormas	Indeks	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang aktif}}{\text{Jumlah Ormas yang mendaftar}} \times 100\%$
2.2.1			program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	$\frac{\text{Jumlah ormas yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah ormas yang aktif}} \times 100\%$

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.3		Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pemahaman Terhadap Aliran Sesat, Pengaruh Asing serta Ketahanan Terhadap Narkoba		Aspek Fasilitasi	Indeks	Hasil survey FKUB, pemantauan orang asing, aliran sesat dan tingkat persentasi narkoba
2.3.1			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik tahun } n - \text{Jumlah kasus konflik tahun } n - 1}{\text{Jumlah kasus konflik tahun } n - 1} \times 100\%$
2.4		Meningkatnya Kewaspadaan Dini dalam Konflik serta Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan dalam Masyarakat		Indeks Potensi konflik	Indeks	Hasil rapat koordinasi kewaspadaan dini dengan instansi terkait terhadap munculnya potensi konflik
2.4.1			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Ancaman/deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	$\frac{\text{potensi konflik yang dicegah}}{\text{potensi konflik yang terdeteksi}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi			Indeks Demokrasi Kabupaten	Persen	Rata-rata persentase hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Dimana: Persentase hasil pemilihan umum = $\frac{\text{Jumlah suara yang memilih pada Pemilu}}{\text{Jumlah Total Pemilih Pemilu}} \times 100\%$ Persentase hasil Pilkada = $\frac{\text{Jumlah suara yang memilih Pilkada}}{\text{Jumlah Total Pemilih Pilkada}} \times 100\%$

ms

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
3.1		Meningkatnya hak-hak politik masyarakat dan peran lembaga demokrasi		Aspek data demokrasi	Persen	Survey tingkat pemahaman politik masyarakat terhadap pemilu dan pilkada
3.1.1			Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peserta Partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai	Persen	$\frac{\text{Jumlah partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai}}{\text{Jumlah partai politik}} \times 100\%$

34. DINAS SYARIAH ISLAM

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah Pelanggaran Syariah Islam yang dilaporkan}} \times 100\%$
2	Meningkatkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Tatahan Kehidupan Bermasyarakat			Tingkat Pelanggaran Syariah Islam yang Diselesaikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Syariah Islam yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Syariah Islam yang dilaporkan}} \times 100\%$

[Handwritten signature]

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
2.1		Meningkatnya Penerapan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat		Persentase jumlah masjid aktif		$\frac{\text{Jumlah masjid yang melaksanakan shalat berjamaah dan pengajian rutin dan PHBI}}{\text{Jumlah masjid di Kab. Bireuen}} \times 100\%$
2.1.1			Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	orang	Jumlah gampong yang mengadakan pengajian rutin

35. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	$\frac{\text{Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan}} \times 100\%$
2	Meningkatkan Nilai-nilai Syariat Islam Dalam-tatanan Kehidupan Bermasyarakat			Tingkat pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilaporkan}} \times 100\%$
2.1		Meningkatnya peran MPU		Persentase Penerapan Hasil keputusan MPU	Persen	$\frac{\text{Jumlah keputusan MPU yang diterapkan}}{\text{Jumlah keputusan MPU}} \times 100\%$
2.1.1			Program Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Sidang yang menghasilkan keputusan	Persen	$\frac{\text{Jumlah sidang yang menghasilkan keputusan}}{\text{Jumlah sidang yang terselenggara}} \times 100\%$

36. SEKRETARIAT BAITUL MAL

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program (outcome)	Satuan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah	Kategori	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
1.1.1			Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Peningjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2	Meningkatkan kesejahteraan umat			Mustahik yang diberdayakan	Orang	Jumlah mustahik yang menerima bantuan
2.1		Pengelolaan ZIS Secara Transparan dan Akuntabel		Peningkatan penerimaan ZIS	Persen	$\frac{\text{Jumlah penerimaan ZIS tahun } n - \text{jumlah penerima ZIS tahun } (n - 1)}{\text{jumlah penerima ZIS tahun } (n - 1)} \times 100\%$
2.1.1			Program Baitul Mal	Jumlah Mustahik	orang	Jumlah Mustahik yang mendapatkan bantuan berdasarkan data dari Baitul Mal

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN